

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hambudi, Teguh, *#1 Professional General Affair: Panduan Bagian Umum Perusahaan Modern*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, 2015.
- HS, Salim, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Kaptan, S.S., *Investment Management*, Sarup & Sons, New Delhi, 2001.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum dalam Pembanguna Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.

- Puang, Victorianus M.H. Randa, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Rokhmatussa, Ana, Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Salim, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Santoso, Urip, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012.
- Supancana, Ida Bagus Rachmdi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabta, Bandung, 2015.
- Susiani, Dina, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Abadi, Jember, 2019..
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan ke- 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Utama, I Made Arya, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Pustaka Putra, Bandung, 2007.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Wardiono, Kelik et.al., *Hukum Perdata*, Cet. 1, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018.

Jurnal

Jamzani, Didi Nuryadin, “Investasidan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.

Setiadi, Wicipto, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha”, Jurnal Rechtsviding Vol. 7 No 3, Desember 2018.

Suratma, Abdul Gani Putra, Abdul Azis, “Tanda Tangan Digital Menggunakan QR Code Dengan Metode Advanced Encryption Standard”, Techno, Vol. 18 No. 1, April 2017.

Warasart, Maykin and Pramote Kuacharoen, “Paper-based Document Authentication using Digital Signature and QR Code”, 4TH International Conference on Computer Engineering and Technology (ICCET 2012) http://as.nida.ac.th/~pramote/publications/paper-based_document_authentication_using_digital_sinature_and_qr_code-iccet2012.pdf, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Karya yang tidak diterbitkan

Djatmiati, Tatiek Sri, “Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.

-----, Urip Santoso dan Lilik Pudjiastuti, “Hukum Perijinan”, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Hadjon, Philipus M., “Tentang Wewenang”, Yuridika, No. 5 dan No 6., September-Oktober 1997.

Kahfi, Ashabul, Implementasi Keputusan Berbentuk Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Rahmah, Mas, “Kebijakan Hukum Investasi”, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Zaidun, Muchammad, “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan“, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Univesritas Airlangga, 2008.

Lembaga

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “TandaTangan Digital untukCegahPemalsuan”,https://kominfo.go.id/content/detail/17374/tanda-tangan-digital-untuk-cegah-pemalsuan/0/sorotan_media, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pedoman Perizinan Berusaha Melalui OSS Untuk Pelaku Usaha, Versi 1.5, Jakarta, Juli 2018, h. 5, <https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994.

Internet

Baderi, Firdaus, “Investor Perlu Jaminan Kepastian Hukum di Indonesia, Neraca”, <http://www.neraca.co.id/article/92552/investor-perlu-jaminan-kepastian-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

Forbes, “Why Invest in Emerging Markets?”, <https://www.forbes.com/pictures/geji45ldk/why-invest-in-emerging-markets-2/#5cff06721bb6>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

Kurnia, Abi Jam'an , “Perlukah Kantor Cabang Memiliki NIB Tersendiri?”,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c010e499aae7/perlukah-kantor-cabang-memiliki-nib-tersendiri>, diakses tanggal 1 Agustus 2018.

Pratama,Akhdi Martin, “DuaBulanBeroperasi, OSS Terbitkan 38.835 NomorIndukBerusaha”,<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/143000726/dua-bulan-beroperasi-oss-terbitkan-38.835-nomor-induk-berusaha>, diakses tanggal 27 Februari 2019

Yolanda, Friska, OSS Terbitkan 1.239 Nomor Induk Setiap Hari, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/plcmx1370-oss-terbitkan-1239-nomor-induk-setiap-hari>, diakses tanggal 27 Februari 2019

“Kepastian Hukum jadi Syarat Mutlak Dorong Investasi di Indonesia”,
<https://www.jpnn.com/news/kepastian-hukum-jadi-syarat-mutlak-dorong-investasi-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937).

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388).

Penetapan Pengadilan

Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2013/PN.TK tanggal 12 Agustus 2013